

**PENGUKURAN KINERJA UNIT KERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM
PERSPEKTIF VALUE FOR MONEY
(Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya)**

Syaza Lifia Nada
lifianada5@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to measure, to analyze and to find out the performance at Cooperation Department and Micro, Small, and Medium enterprises in Surabaya city which is measured by using value for money concept. The research method has been carried out by using qualitative. The data collection technique has been conducted by using interview and documentation. Meanwhile, the analysis of performance appraisal has been done on the basis of economic, efficient, effectiveness performance which refers to input, output, and outcome. The result of the discussion and the analysis about performance appraisal at work unit of Local Government in the perspective of value for money in the Cooperation Department and Micro, Small, and Medium enterprises in Surabaya city in 2014-2015 periods shows that in determining economic performance it is done by considering the budget (input) and budget realization. The efficient performance is considered from the amount of the realization of output which has been generated to the input. The effective performance is considered from the output or the outcome which has been succeeded in running the objective of the institution in achieving the expected program. Even though the performance report of Cooperation Department and Micro, Small, and Medium enterprises in Surabaya city shows the achievement of the performance of economic, efficient, and effectiveness is in accordance with the expectation. Nevertheless, the improvement of relevant performance appraisal model is required, by considering the relevancy of the purpose of the activity and the program.

Keywords : Value for money, economic, efficient, effectiveness.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur, menganalisis, serta mengetahui kinerja pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya yang diukur dengan konsep *value for money*. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis penilaian kinerja dilakukan berdasarkan kinerja ekonomis, efisiensi, efektivitas, yang mengacu pada indikator masukan (*input*), indikator keluaran (*output*), dan indikator hasil (*outcome*). Hasil analisis dan pembahasan mengenai pengukuran kinerja unit kerja pemerintah daerah dalam perspektif *value for money* pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya tahun 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa, dalam menentukan kinerja ekonomi mempertimbangkan anggaran (*input*) dengan realisasi anggaran. Kinerja efisien terlihat dari jumlah realisasi *output* yang dihasilkan terhadap *input*. Kinerja efektif dilihat dari *output* maupun *outcome* yang telah berhasil dalam menjalankan tujuan instansi dalam mencapai program yang diharapkan. Meskipun dengan laporan kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya sudah menunjukkan capaian kinerja ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan yang diharapkan, namun demikian diperlukan pengembangan model pengukuran kinerja yang relevan, dengan mempertimbangkan relevansinya tujuan program dan kegiatan.

Kata kunci : *value for money*, ekonomi, efisien, efektivitas

PENDAHULUAN

Saat ini organisasi sektor publik berupaya memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat, hal ini disebabkan oleh naiknya tingkat kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Bentuk respon kesadaran tersebut dibuktikan dengan mulai banyaknya aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, selain itu juga memiliki standar mutu untuk mengukur keberhasilan kinerja. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan dari masyarakat yang mulai mempertanyakan manfaat-manfaat atas pelayanan instansi pemerintah.

Bentuk nyata dari perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002:18). Dalam menjalankan organisasi publik di Indonesia perlu membawa serangkaian tujuan dan hasil, oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen memiliki standart perhitungan sendiri, sehingga beberapa daerah di Indonesia sudah mulai mengembangkan tunjangan berbasis kinerja, tunjangan ini bertujuan agar meningkatkan kinerja pegawai negeri agar mampu mencapai efektivitas organisasi. Kemudian organisasi ini juga harus mampu menghasilkan barang atau layanan publik yang efisien, dengan maksud agar pelayanan yang selama ini masih mengandalkan "tip" dari masyarakat dapat berubah, dan dapat menghasilkan pegawai negeri yang berkualitas serta sarat akan fungsi (Sugandi, 2011:41).

Menurut Mardiasmo (2002:20) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Beberapa instansi pemerintah telah menggunakan model pengukuran kinerja dengan menggunakan perspektif *value for money*. Beberapa instansi pemerintah telah menggunakan model pengukuran kinerja dengan menggunakan perspektif *value for money*. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Kurrohman (2013) yang menyebutkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja menggunakan metode *Value for Money* menunjukkan adanya perbedaan sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja pada rasio ekonomi dan efisien, tetapi tidak ditemukan perbedaan sebelum dan sesudah penerapan penganggaran berbasis kinerja pada rasio efektif.

Sedangkan penelitian dari Arfan (2014) menyebutkan bahwa kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2012 telah menjalankan keseluruhan programnya dengan ekonomis, efisien, dan efektif namun terdapat satu program yang kurang efektif yaitu program Peningkatan Kesejahteraan Petani, karena pada pelaksanaannya capaian kinerja yang dihasilkan kurang maksimal yaitu sebesar 99,29%.

Dengan memperhatikan kinerja instansi pemerintah yang sering menjadi sorotan masyarakat dan juga dampak yang diberikan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di Surabaya, maka penulis tertarik untuk mengemukakan masalah dalam mengukur kinerja unit kerja Dinas Koperasi dan UMKM di Surabaya menggunakan perspektif *Value for Money*. Untuk melaksanakan fungsinya sebagai organisasi sektor publik Dinas Koperasi dan UMKM dapat dilakukan dengan hasil pelaporan dan mengukur kinerja organisasi berdasarkan pedoman kinerja organisasi pemerintah sebagai alternatif pengukuran kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya.

Permasalahan ini menjadi latar belakang penulisan skripsi, maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah "Pengukuran Kinerja Unit Kerja Pemerintah Daerah dalam Perspektif *Value For Money*". Agar tidak meluas, ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan dengan mengukur kinerja pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya selama tahun 2014 dan 2015.

TINJAUAN TEORETIS

Definisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Menurut Mahmudi (2007:12) Kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas.

Sedangkan menurut Mahsun (2006:25) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertrson, 2002 dalam Mahsun, 2006:25).

Tujuan Pengukuran sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2002:122) secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah: (a) untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*) (b) untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi (c) untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*, dan (d) sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Sedangkan tujuan dilakukan pengukuran kinerja di sektor publik menurut Mahmudi (2007:14) adalah: (a) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak (*milestone*) yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan (b) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi dan mewujudkan visi dan misinya. Sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi (c) Memperbaiki kinerja periode berikutnya. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi (*achievement culture*) di dalam organisasi (d) Memberikan pertimbangan yang sistematis

dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishmen*. Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan *reward*, misalkan kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi, atau *punishment*, misalkan pemutusan kerja, penundaan promosi dan teguran (e) Memotivasi pegawai. Pengukuran kinerja bertujuan meningkatkan motivasi pegawai. Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*. *Reward* tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi (f) Menciptakan akuntabilitas pegawai. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas.

Manfaat Pengukuran Sektor Publik

Sektor publik tidak lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. Sementara dari perspektif internal organisasi, pengukuran kinerja juga sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian. Berikut manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi sektor publik (BPKP, 2000 dalam Mahsun, (2006:33) : (a) memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja (b) memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati (c) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja (d) memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan skema indikator kinerja yang telah disepakati (e) menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi (f) mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi (g) membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah (h) memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif (i) menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan (j) mengungkap permasalahan yang terjadi.

Elemen Pokok Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Menurut Mahsun (2006: 158) dapat disimpulkan elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain Menetapkan Tujuan, Sasaran dan Strategi Organisasi. Tujuan adalah pernyataan secara umum atau belum secara eksplisit (tentang apa yang ingin dicapai organisasi). Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan sasaran dan strategi tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi. Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi tersebut selanjutnya dapat ditentukan indikator dan ukuran kinerja secara tepat.

Aspek Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja biasanya dilakukan untuk aspek-aspek berikut ini (Bastian, 2006: 331): (a) aspek finansial meliputi anggaran atau cash flow. Aspek finansial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja sehingga dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia. (b) dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan. Untuk itu, manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan tentang tingkat kepuasan pelanggan (c) informasi operasi dan mekanisme pasar internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi

dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Disamping itu, informasi operasi dan pasar internal menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas operasi organisasi (d) dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai amat menentukan kelangsungan organisasi (e) pengukuran kinerja perlu dirancang untuk mengakomodasi kepuasan para *stakeholders* (f) informasi untuk pengukuran harus informasi terbaru, sehingga manfaat hasil pengukuran kinerja dapat dimaksimalkan.

Penilaian Kinerja *Value For Money*

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. *Value For Money* sendiri merupakan konsep yang penting dalam organisasi sektor publik. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan kinerjanya. Konsep *Value For Money* terdiri atas tiga elemen utama, yaitu: (a) Ekonomi merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (b) Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (c) Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Dari uraian ketiga elemen tersebut, dapat disimpulkan bahwa: ekonomi terkait dengan *input*, efisiensi terkait dengan *input* dan *output*, dan efektivitas terkait dengan *output* dan tujuan.

Menurut Mardiasmo, (2002:4) *Value for money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output maksimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kampanye implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan *good governance*. Implementasi konsep *value for money* diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik.

Manfaat Implementasi Konsep *Value for Money*

Manfaat Implementasi Konsep *Value for Money* pada Organisasi Sektor Publik menurut Mardiasmo, (2002:7) antara lain : (a) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran (b) Meningkatnya mutu pelayanan publik (c) Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input (d) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik dan (e) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Dari berbagai manfaat yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Value for Money* dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

Langkah-Langkah Perencanaan dan Pengukuran Kinerja *Value For Money*

Menurut Mahmudi (2007: 93) langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat perencanaan dan pengukuran kinerja *Value for Money* terdiri atas empat tahap, yaitu : (a) Penentuan misi, visi, dan tujuan (*goal*), serta strategi. Setiap indikator kinerja harus

dikaitkan dengan pencapaian misi, visi, tujuan, sasaran, dan target. Penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target dapat didahului dengan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat (b) Penerjemahan misi, visi, dan tujuan (*goal*), serta strategi ke dalam: Sasaran strategik, Inisiatif strategik, Indikator kinerja (*input, output, outcome, benefit, impact*), Target kinerja (c) Penyusunan program (d) Penyusunan anggaran.

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, fenomena, perilaku, peristiwa-peristiwa, pengetahuan dan objek studi yang dapat diamati oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan suatu jenis penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan atau pun fakta-fakta yang ada pada saat diadakan penelitian.

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Moleong (2002:4) adalah sebagai berikut: (a) Penelitian dilakukan pada latar belakang ilmiah atau konteks keseluruhan. Penulis melakukan penelitian pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya (b) Manusia sebagai alat, maksudnya manusia dikategorikan sebagai pengumpul, pengolah, dan penganalisis data yang dibutuhkan dalam penulisan ilmiah (c) Data yang akan dikumpulkan oleh peneliti data yang bersifat deskriptif. Profil organisasi dan data berbagai lainnya dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran situasi dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya (d) Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama dari pihak penulis dan pihak yang bersangkutan dalam penyusunan penulisan ilmiah ini.

Sedangkan metode yang digunakan dalam pendekatan kualitatif, dan analisis deskriptif adalah jenis penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada pada saat diadakan penelitian sesuai dengan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder sendiri menurut Indriantoro dan Supomo (2002:147) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, yaitu dengan observasi langsung dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah : (a) Survey Pendahuluan. Peneliti melakukan kunjungan awal pada objek penelitian untuk mengetahui gambaran secara umum objek penelitian serta situasi, kondisi, dan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini (b) Survey Lapangan. Peneliti melakukan tinjauan langsung pada objek penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan dengan melakukan pengumpulan data melalui beberapa cara, seperti: Wawancara merupakan penggunaan teknik pengumpulan data dalam metode survey dengan menggunakan teknik tanya jawab secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan subjek penelitian dan dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa langsung pada dokumen, catatan tertulis, arsip-arsip, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, seperti mengumpulkan data-data objek penelitian dari tempat objek penelitian berupa gambaran umum objek penelitian,

profil perusahaan, meliputi gambaran umum perusahaan, sejarah singkat perusahaan, lokasi dan bentuk perusahaan, struktur organisasi serta visi dan misi perusahaan, laporan kinerja pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya.

Satuan Kajian

Penelitian deskriptif kualitatif perlu menjelaskan satuan kajian yang merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data serta memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada pada saat diadakan penelitian. Objek penelitian yang dibutuhkan: (a) Pengukuran Kinerja ditujukan untuk meningkatkan kinerja secara umum, dan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan suatu unit pemerintah diperlukan adanya suatu pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi kepada pengguna Laporan Kinerja. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya sebagai objek penelitian, dimana Dinas Koperasi dan UMKM merasa kemajuan kota haruslah memberikan kemanfaatan sekaligus memberikan ruang bagi warga untuk berpartisipasi di dalamnya. Untuk itu, Pemerintah Kota telah mengagendakannya dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat. bentuk keseriusan Pemerintah Kota Surabaya mewujudkan pada melibatkan beberapa Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) dalam mengusahakan program - program pemberdayaan. Masing - masing memiliki program dengan jenis dan target yang berbeda. (<http://dinkop-umkm.surabaya.go.id/>) (b) Perspektif *Value For Money* yang mempunyai 3 elemen utama antara lain: pertama, Pengukuran Ekonomi. Ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (*input*) sebaiknya dengan harga yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Dalam penelitian ini pengukuran ekonomi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran. Suatu kinerja organisasi dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran dan dapat mencapai *output* (keluaran) sesuai dengan yang ditetapkan atau 100%. Kedua Pengukuran Efisiensi. Efisiensi merupakan hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan menggunakan sumber daya (*input*) yang disediakan. Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif. Dalam pengukuran kinerja *Value for Money*, efisiensi dapat dibagi menjadi dua yaitu efisiensi alokasi, efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat *output* tertentu. Dengan keterangan *output* adalah keluaran yang dicapai dari suatu kegiatan atau program sedangkan *Input* adalah segala sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar besarnya. Ketiga Pengukuran Efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Hal terpenting dalam efektivitas adalah efektivitas tidak menyatakan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan dalam mencapai tujuan tertentu melainkan hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas diukur dengan membandingkan *Outcome* dengan *Output*. Suatu kinerja organisasi dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang ditetapkan melalui terlaksananya semua program atau kegiatan yang telah direncanakan.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap dan benar agar pihak lain lebih mudah memperoleh gambaran mengenai karakteristik obyek dari data tersebut.

Langkah-langkah analisis data untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut: (a) Mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi data pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, kegiatan operasional manajerial dan program kerja maupun target yang hendak dicapai. (b) Untuk menganalisa efisiensi dan efektifitas kinerja menggunakan perbandingan antara data Satuan Kinerja Pemerintah Daerah dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Penganalisaan data dimulai dengan evaluasi penetapan pengukuran kinerja dengan tahap yang pertama, menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang berupa visi dan misi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. Kedua, Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Langkah-langkah dalam merumuskan indikator dan ukuran kinerja adalah sebagai berikut: Menuliskan tujuan atau *outcome* yang diharapkan dengan jelas untuk mengembangkan indikator kinerja yang baik; Mengidentifikasi dan menjelaskan keterkaitan antara *outcome* yang diharapkan dengan *output* yang dihasilkan unit kerja; Memastikan bahwa indikator kinerja kunci telah ditentukan dan mendapat persetujuan manajemen; Menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada budaya berprestasi untuk mencapai tujuan organisasi, evaluasi diri, pelibatan dan partisipasi pegawai serta keterbukaan dalam berkomunikasi; Memperkerjakan orang yang memiliki keahlian memadai untuk mengembangkan indikator yang memuaskan; Memastikan bahwa tujuan berfokus pada kebutuhan pelanggan dan *outcome* yang diharapkan; Menggunakan indikator kinerja untuk perencanaan kinerja dan manajemen kinerja pada level strategik dan operasional; Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi; Evaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas). Ketiga, mendeskripsikan data penelitian yang terkait dengan materi kajian penelitian. Keempat, analisis dan pembahasan evaluasi pelaporan kinerja dan penilaian kinerja instansi pemerintah deskripsi data dan berlandaskan teori yang relevan. Kelima, Memberikan simpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Model Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya

Bastian (2006:274) mengatakan dalam mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada input program, tetapi juga pada keluaran manfaat dari program tersebut.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya tidak terlepas dari Pemerintahan Kota Surabaya dalam upayanya menyajikan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pihak Dinas Koperasi dan UMKM menyampaikan bahwa setiap pengukuran yang mereka lakukan adalah melalui sistem yang sudah disediakan oleh Pemerintahan Kota Surabaya, yaitu *E-performance* seperti yang disampaikan oleh Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya.

Model Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya Menggunakan Perspektif *Value For Money*

Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya Ditinjau Dari Segi Ekonomis

Tingkat ekonomi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan presentase tingkat pencapaiannya. Berdasarkan penetapan kinerja pada Dinas Koperasi dan UMKM dengan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2014 dan 2015, maka target anggaran yang bisa dicapai oleh Dinas Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Realisasi Anggaran Tahun 2014 - 2015

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi		
		Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Total (Rp)
2014	30.182.458.630	15.474.420.563	5.565.242.807	21.039.663.370
2015	26.296.305.812	15.593.749.562	6.472.668.840	22.066.418.402

Sumber : Lakip 2014 dan Lakip 2015

Anggaran Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Tahun 2015 dan 2014 sebesar Rp. 26.296.305.812,00 dan Rp. 30.182.458.630,00. Sedangkan realisasi belanja Tahun 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp. 22.066.418.402,00 dan Rp. 21.039.663.370,00 yang terdiri dari masing-masing pada Tahun 2015 dan 2014 belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.472.668.840,00 dan Rp. 5.565.242.807,00. Belanja langsung/program sebesar Rp. 15.593.749.562,00 dan Rp. 15.474.420.563,00.

Dari hasil di atas, perkembangan pengukuran ekonomis Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya tahun 2014 dan 2015 berada pada katagori ekonomis, karna suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Terjadi pengurangan pada anggaran tahun 2015 yang disebabkan oleh proses tepat guna pendanaan yang digunakan untuk pembangunan sentra-sentra di Kota Surabaya.

Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya Ditinjau Dari Segi Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Mahmudi (2005:89) mengatakan bahwa dalam organisasi sektor publik setiap pengeluaran perlu dibuat standar belanjanya sebagai bentuk standar biaya. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Suatu organisasi, program, atau dapat kegiatan dikatakan efisien apabila menghasilkan output tertentu dengan input serendah rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar besarnya. Dalam penelitian ini pengukuran efisiensi dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100\%$$

Berikut adalah tabel perhitungan Kinerja dinas Pendidikan Kota Surabaya ditinjau dari efisiensi :

Tabel 2
Pengukuran Efisiensi Tahun 2014

No	KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%
	URAIAN	INDIKATOR			
1	Peningkatan jaringan kerja sama antar lembaga	Jmlh kel. usaha mikro-kecil yg difasilitasi menjalin kerjasama dgn pihak lain dlm pengembangan Usaha	356.895.487	339.367.625	95,09%
2	Penyelenggaraan pembinaan industri kecil dan menengah	Jangka waktu pendampingan pembinaan usaha bagi 5 kelompok usaha mikro kecil	453.605.910	384.615.759	84,79%
3	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan untuk memasarkan produk umkm	1.139.467.366	502.280.934	44,08%
4	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi	Jumlah peserta sosialisasi prinsip perkoprasian	438.558.070	285.421.744	65,08%
5	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	jumlah koperasi simpan pinjam yang difasilitasi untuk mengembangkan jaringan kerjasama usaha	474.559.678	385.009.020	81,13%
6	Fasilitasi kemudahan pendirian unit koperasi baru	Jumlah lembaga baru koperasi yang dapat dibentuk	249.399.016	226.293.470	90,74%
7	Peningkatan dan pengembangan usaha koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif yang ditingkatkan kapasitas dan kemampuan usahanya	931.770.860	603.976.340	64,82%
8	Peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT	Jumlah koperasi ber RAT yang ditingkatkan konsistensi pengelolaannya	366.604.619	334.981.090	91,37%

9	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi aktif belum RAT	Jumlah koperasi aktif belum RAT yang ditingkatkan kualitas kelembagaannya	289.494.560	244.075.939	84,31%
10	Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT	Jumlah koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT yang direvitalisasi	446.929.251	387.458.687	86,69%
11	Penyediaan barang dan jasa perkantoran	Tersedianya 8 jenis kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran	1.446.978.507	1.312.456.558	90,70%
12	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpeliharanya 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	655.072.984	574.298.741	87,67%
13	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang Kakilima dan Asongan	jangka waktu pendampingan pembinaan di 21 sentra PKL yang telah terbangun	634.454.376	378.823.140	59,71%
14	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	jumlah usaha PKL yang ditata	15.302.283.640	9.376.103.916	61,27%
15	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	Jumlah sentra PKL terbangun yang mendapatkan pengawasan mutu dagangan	273.475.302	139.257.600	50,92%

Sumber : LAKIP 2014

Tabel 3
Pengukuran Efisiensi Tahun 2015

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			
				Target	Realisasi	%
1	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan untuk memasarkan produk umkm	1.342.015.013	1.135.489.982	84,61%
2	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah lokasi tempat usaha PKL dan asongan yang ditata per tahun	12.445.624.719	9.227.329.426	74,14%
		Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah Pendampingan Manajemen Usaha di Sentra PKL	736.752.036	595.210.197	80,79%
3	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah peserta sosialisasi prinsip perkoperasian	372.818.920	339.295.384	91,01%
		Fasilitasi kemudahan pendirian unit koperasi baru	Jumlah lembaga baru koperasi yang dapat dibentuk	304.111.478	301.604.433	99,18%
		Peningkatan Konsistensi Pengelolaan Koperasi Ber-RAT	Jumlah koperasi ber-RAT yang mendapatkan bintek pengelolaan koperasi	312.097.422	305.699.392	97,95%
		Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT	Jumlah koperasi ber-RAT yang ditingkatkan konsistensi pengelolaannya	642.463.964	562.510.705	87,56%

	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	Jumlah koperasi yang dipetakan kinerja usahanya	233.919.394	198.746.690	84,96%	
	Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang difasilitasi untuk mengembangkan jaringan kerjasama usaha	334.037.961	285.362.011	85,43%	
	Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif yang mendapatkan bintek pengembangan usaha koperasi	505.135.495	414.440.939	82,05%	
	Fasilitasi Persiapan Sertifikasi Kompetensi Usaha Koperasi Simpan Pinjam	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk persiapan Sertifikasi Kompetensi Usaha	396.342.885	341.594.120	86,19%	
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Tersedianya 8 jenis kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran	1.379.619.946	1.316.795.953	95,45%
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpeliharanya 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	658.322.362	569.670.330	86,53%

Sumber : LAKIP Tahun 2015

Adapun capaian kinerja keuangan terkait pencapaian kinerja adalah sebagai berikut : untuk kegiatan yang penyerapan anggarannya 100 persen antara lain kegiatan Peningkatan jaringan kerja sama antar lembaga, Penyelenggaraan pembinaan industri kecil dan menengah, Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi, Fasilitasi

kemudahan pendirian unit koperasi baru, Peningkatan dan pengembangan usaha koperasi aktif, Penyediaan barang dan jasa perkantoran, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Adapun kegiatan yang mencapai 90% adalah sebagai berikut : Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi, Peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT, Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi aktif belum RAT dan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan, sedangkan yang diatas 60 persen adalah kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL sedangkan satu kegiatan dengan capaian penyerapan sebesar dibawah 50 persen adalah kegiatan Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT. Kegiatan Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT tidak bisa mencapai target disebabkan antara lain karena alamat koperasi pindah tanpa pemberitahuan ke Dinas Koperasi dan UMKM, Koperasi sudah tidak aktif (tidak terlacak keberadaannya), alamat pengurus sudah pindah dan perusahaan dalam keadaan pailit sehingga otomatis koperasi juga tidak aktif.

Berdasarkan tabel LAKIP 2014 dan LAKIP 2015, dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya secara umum dapat dinilai efisien. Nilai efisiensi terlihat dari capaian atau realisasi dari indikator keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam merealisasikan kegiatan operasi terhadap indikator masukan (*input*) yang digunakan. Bastian (2006:280) menyebutkan bahwa dalam pengukuran rasio tidak bersifat absolut tetapi bersifat relatif dan rasio dapat diperbaiki dengan 4 cara, yaitu : (a) Meningkatkan output pada input yang sama (b) Proporsi peningkatan output lebih besar dari proporsi peningkatan mutu (c) Menurunkan input pada output yang sama (d) Proporsi penurunan penggunaan input lebih besar dari proporsi penurunan output

Kinerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ditinjau Dari Segi Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Hal terpenting dalam efektivitas adalah efektivitas tidak menyatakan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan dalam mencapai tujuan tertentu melainkan hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bastian (2006:280) menyebutkan apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif.

Hasil capaian kinerja tahun 2014 apabila dibandingkan dengan tahun 2015 dapat terlihat seperti tabel 4. Terlihat bahwa terdapat 6 (enam) kegiatan yang pada tahun 2015 realisasi capaian kegiatan meningkat dibandingkan dengan tahun 2014, yakni penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah, pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian, Sosialisasi prinsip pemahaman perkoperasian, peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT, revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT dan fasilitasi persiapan sertifikasi kompetensi usaha koperasi simpan pinjam.

Sedangkan ada 3 (tiga) kegiatan hasilnya tetap dengan tahun 2014 dibandingkan tahun 2015 yakni penyediaan barang dan jasa perkantoran pengadaan sarana dan prasarana perkantoran dan fasilitasi kemudahan pendirian unit koperasi baru, namun terdapat juga capaian 3 (tiga) hasil kegiatan di tahun 2015 menurun dari capaian hasil 2014, yakni peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi, pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan dan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan. Pada tahun 2015 terdapat kegiatan baru yang di tahun 2014 tidak ada, namun merupakan rangkaian dari sub kegiatan yang menjadi kegiatan tersendiri untuk menunjang capaian program yakni pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian dan fasilitasi persiapan sertifikasi kompetensi usaha koperasi simpan pinjam.

Tabel 4
Pengukuran Efektivitas

No	KATEGORI CAPAIAN	2014	2015
1	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	100%
2	Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	100%
3	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	83%	111 %
4	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	-	110 %
5	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	89%	94 %
6	Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	100%	85 %
7	Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru	103 %	103 %
8	Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif	100%	90%
9	Peningkatan Konsistensi Pengelolaan Koperasi Ber RAT	95%	108 %
10	Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT	20%	119 %
11	Fasilitasi Persiapan Sertifikasi Kompetensi Usaha Koperasi Simpan Pinjam	-	78%
12	Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima Dan Asongan	100%	92%
13	Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima Dan Asongan	90%	75%

Sumber : LAKIP 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi dan UMKM dalam mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dikarenakan ada banyak kegiatan yang mendekati target, walaupun ada beberapa kegiatan di Tahun 2015 yang pencapaiannya dibawah 80%.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Menurut hasil analisis dan pembahasan tentang Pengukuran Kinerja Unit Kerja Pemerintah Daerah Dalam Perspektif *Value For Money*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (a) Model Pengukuran Dinas Koeperasi dan UMKM Kota Surabaya dilakukan secara sistematis melalui program *E-performance*, dimana sistem ini menurut penuturan dari Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sistem yang telah dibakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pengukuran kinerja menggunakan sistem *E-performance*

dilaksanakan dengan baik, dalam melaksanakan kegiatannya, Dinas Koperasi dan UMKM mengupayakan tidak terjadi pemborosan. Dalam kinerjanya, untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kinerja, maka Dinas Koperasi dan UMKM melakukan evaluasi kinerja yang juga tersaji sistem pelaporannya dalam *E-performance*. (b) Hasil pengukuran kinerja ditinjau dari tingkat ekonomisnya menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya pada Tahun 2015 dinilai lebih ekonomis atau lebih hemat. Hal ini berdasarkan perbandingan realisasi pengeluaran dan anggaran pengeluaran, Walaupun dalam perhitungan menurut *Value For Money* tahun 2014 lebih ekonomis, akan tetapi pada realisasinya tahun 2015 lebih hemat, hal ini dikarenakan besarnya penganggaran pada tahun 2014 sehingga banyak dana yang dikembalikan ke Pemerintahan Kota Surabaya. (c) Hasil Pengukuran ditinjau dari tingkat efisiensinya menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya selama tahun tahun 2014 dan 2015 dapat dinilai relatif efisien. Walaupun terdapat perbedaan pada kegiatan di tahun 2014 dan 2015, hal ini tidak menjadi hambatan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya untuk mencapai tingkat efisiensi. Tingkat efisiensi diukur berdasarkan perbandingan antara *output* terhadap *input*, dimana target dan anggaran untuk setiap kegiatan digunakan secara efisien dan mampu menjalankan kegiatan sesuai dengan target yang direncanakan. (d) Hasil pengukuran kinerja ditinjau dari tingkat efektivitasnya menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya pada tahun 2014 dan 2015 dinilai efektif. Hal ini diukur berdasarkan hasil-hasil yang dicapai *output* maupun *outcome*. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya telah dapat menjalankan tujuan organisasi, dimana rencana dalam penyusunan program dan kegiatan operasi organisasi sektor publik untuk mencapai tujuan organisasi dapat direalisasikan sesuai dengan target yang diharapkan.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya dan bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu: (a) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya untuk tahun-tahun selanjutnya, agar tercipta *good governance* dan sukses dalam membangun Kota Surabaya yang lebih sejahtera. Untuk meningkatkan ekonomi, efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan, maka Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya hendaknya selalu berinovasi dalam setiap program dan kegiatannya agar berjalan semakin baik lagi dan mampu mencapai tujuan serta sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. (b) Penelitian selanjutnya diharapkan dalam mengukur kinerja suatu organisasi tidak hanya menggunakan tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, tetapi perlu ditambah dengan dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan kesetaraan (*equality*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, D. A. 2014. Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011 - 2012. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Bastian, I. 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Indriantoro, N. dan Bambang S. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Kadafi, L. 2014. Pengukuran Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. *Skripsi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Tanjungpinang.
- Kurrohman, T. 2013. Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value for Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Akuntansi* 5 (1): 1-11.

- LAN dan BPKP. 2000. *Modul Sosialisasi Sistem akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah*. Cetakan pertama. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Latar Belakang Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. <http://dinkop-umkm.surabaya.go.id/index.php/page/detail/latar-belakang.html>
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Revisi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga. Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nordiwana, D. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Sugandi, Y.S. 2011. *Administrasi Publik : Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Jakarta.
- Tim Penyusun LAKIP. 2014. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Instansi Pemerintah*. Dinas Koperasi dan UMKM. Surabaya
- Tim Penyusun LAKIP. 2015. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Instansi Pemerintah*. Dinas Koperasi dan UMKM. Surabaya